

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN FISIK (Studi Tentang Penyelesaian Pembangunan Proyek Fisik di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011)

Oleh:
Helmi Hadi
Erman

[\(helmi_hadi09@yahoo.com\)](mailto:helmi_hadi09@yahoo.com)

Abstract

This study aims to determine the physical construction of the project supervision by the regional government and the scope of the Public Works Department, and investigate the factors that affect physical development supervision in 2011. As for the background of this research work is still a few projects that are not completed and are not suitable targets are achieved.

This includes research into the types of qualitative research using in-depth interview data collection technique to several informants research. Which consists of the part of administrators, government agencies, the Department of Public Works, the project supervisor Consultant, Member of the Board, and several community leaders.

Results of this study indicate that there are some things that impede surveillance affecting project implementation, monitoring observations corresponding author can be categorized still not good, because they lack the maximum performance in the Public Works Department officials supervising physical development and persistence of the factors inhibiting the supervision physical development, one of them in terms of infrastructure facilities. In the regulatory process that sets standards, assessment act, and take corrective action, based on the observation that the author can still unwell, according to the authors, the problem now is the problem in doing surveillance or monitoring of physical development in the Meranti Islands Regency only done once a month. So the impact of the construction project and quality. Physical factors inhibiting local government oversight in physical development in Meranti Islands Regency, which is a constraint in terms of the first Human Resources is the minimal number of supervisors, and in terms of quality inspectors who are categorized still minimal and in terms of honorarium, salary is still a lack of oversight and lack of facilities or vehicles completeness Department in overseeing the physical development in Meranti Islands Regency.

Keywords: Monitoring, Physical Development, and Kabupaten Meranti

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perda kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015, Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan sistem manajemen sumber daya manusia Aparatur yang merupakan tuntutan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam perkembangan strategik, dan pembangunan daerah yang memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process, dan salah satu institusi dalam hal ini adalah ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Pasal 1, tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, menyatakan bahwa :

“Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 Pasal 1, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa:

“Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian penyusutan, dan penilaian.”

Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Sumber Daya manusia, dan juga kualitas pembangunan fisik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum. Tujuan yang ingin dicapai melalui pengawasan pembangunan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan proyek pembangunan fisik, meningkatnya disiplin stakeholder pembangunan fisik, meningkatnya efektivitas sumber daya aparatur, dan meningkatnya profesionalisme aparatur. Sehingga akan tercapai Visi Dinas Pekerjaan Umum yaitu : *“Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Sarana Ke PU-an handal berhasil guna serta berwawasan Lingkungan Menuju Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul”*.

2. Kerangka Teoritis

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam

rencana sebelumnya. Pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya kegiatan perencanaan dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan ini berkaitan erat sekali dengan perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi karena :

Fungsi pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan.

1. Pengawasan hanya dapat dilakukan, jika ada perencanaan/rencana.
2. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengawasan dilakukan secara baik.
3. Tujuan baru diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengawasan dan pengukuran dilakukan.(Hasibuan, 1995: 222).

Juran dan Gryna, Jr. Mengemukakan tiga buah definisi pengawasan kualitas. Pengawasan kualitas adalah keseluruhan kumpulan kegiatan yang melalui kegiatan tersebut dicapai kecocokan untuk digunakan, yaitu melaksanakan fungsi kualitas.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.* Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.*

3. Masalah Penelitian

Pelaksanaan pengawasan penting, diharapkan dengan dilakukannya pengawasan oleh instansi terkait, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, maka dapat menekan terjadinya kecurangan atau penyimpangan yang terjadi. Pengawasan yang dilakukan menyangkut pengawasan masalah pembangunan yang merupakan kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak, dilihat dari sisi pemerintah, pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi janji politik kepada rakyat, dari sisi rakyat, pembangunan merupakan kebutuhan rakyat dalam rangka memberikan kemudahan kepada rakyat dan tujuan yang harus dicapai dalam rangka mensejahterakan kehidupan rakyat.

Berikut permasalahan yang terjadi terkait minimnya realisasi pembangunan fisik di Kabupaten Kepulauan Meranti :

1. Pembangunan Proyek Fisik Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Kab. Kep. Meranti Tahun 2011
2. Pembangunan Proyek Fisik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kab. Kep. Meranti Tahun 2011
3. Pembangunan Proyek Fisik Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kab. Kep. Meranti Tahun 2011

Disamping itu, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dihadapkan pada kondisi belum tersedianya data base keciptakaryaan, kebinamargaan dan pengairan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu masih minimnya ketersediaan fasilitas gedung dan peralatan pendukung dalam pelaksanaan tugas yang dapat menyebabkan terhambatnya penyelesaian pembangunan daerah.

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

4.1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan proyek pembangunan fisik oleh pemerintah Daerah dan ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum,
- 2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pembangunan fisik

4.2. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan dan mendapat suatu gambaran yang ada sesuai dengan data dilapangan, diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi dunia akademis maupun dunia praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini secara khusus adalah :

- 1) Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan untuk melihat pengawasan pemerintah dalam pembangunan fisik, dan proses pelaksanaan serta penyebab terkendalanya pembangunan fisik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

- 2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk melatih diri serta memperluas wawasan sebagai bekal untuk menjalankan tugas selanjutnya

METODE PENELITIAN

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

1. Observasi (pengamatan)

Yaitu mengumpulkan informasi dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian dengan mencatat secara sistematis hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara langsung dengan responden guna mengkonfirmasi data.

3. Studi Kepustakaan

Yaitu peneliti menyediakan benda-benda tertulis seperti : literature yang berhubungan dengan kajian teoritik penelitian, dokumen-dokumen tertulis yang berhubungan dengan obyek penelitian dengan peraturan-peraturan perundang-undangan.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Antara lain meliputi : wawancara ataupun catatan tertulis.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkait pengawasan pemerintah dalam pembangunan fisik dan penyelesaian proyek tahun 2011 Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang dibutuhkan antara lain :

1. Data gambaran umum Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Data mengenai profil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Data pembangunan fisik pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti 2011
4. Data terkait pengawasan proyek

3. Analisis Data

Dalam penelitian jenis kualitatif ini peneliti menterjemahkan dan menguraikan data secara deskriptif sehingga diperoleh gambaran mengenai situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan dan juga didukung dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan para informan berdasarkan indikator- indikator yang ditentukan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Fisik

a. Menentukan Standar

Dalam menetapkan standar yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh Bagian Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan pengawasan pembangunan fisik Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :

a) Standar Kegiatan

Standar disini maksudnya yaitu yang diterapkan atau dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan pengawasan pembangunan fisik di Meranti. Standar kegiatan tersebut seperti melakukan kegiatan memeriksa kondisi proyek fisik apakah proyek tersebut sesuai dengan perencanaan atau tidak, standar ini berdasarkan standar kegiatan kerja Bidang Bina Marga.

Standar kegiatan dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan fisik di Kabupaten Kepulauan Meranti dilaksanakan berdasarkan standar kerja bidang Cipta Karya.

b) Standar Waktu

Standar waktu adalah penentuan jadwal yang ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti didalam melakukan pembangunan proyek fisik. Standar waktu dalam melakukan pengawasan pembangunan fisik di Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan satu bulan sekali.

Standar waktu yang ditentukan bidang Bina Marga dalam melakukan pengawasan waktunya 1 bulan sekali dan masa pemeliharaan selama 6 bulan, tetapi yang terjadi pada proyek pembangunan fisik di Kabupaten Kepulauan Meranti seperti sama sekali tidak dilakukannya pengawasan, karena masih banyak proyek pembangunan fisik di Kabupaten Kepulauan Meranti bermasalah dan penyelesaiannya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

b. Melakukan Tindakan Penilaian dan Mengevaluasi

Melakukan penilaian disini dimaksud mengandung arti tindakan penilaian dan mengukur apa yang sedang dilaksanakan dan apa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan standar ukur dan petunjuk-petunjuk arahan. Adapun sub indikator yang menjadi proses melakukan tindakan penilaian dan evaluasi adalah sebagai berikut :

a) Menilai waktu

Dalam menilai waktu dalam pengerjaan pembuatan sejumlah proyek pembangunan sangatlah diperhitungkan karena dalam pengerjaan tugas pembuatan proyek sudah ditetapkan. Oleh karena itu disini waktu yang digunakan tidak boleh lewat dari waktu yang sudah ditetapkan. Dan menilai waktu pengawasan juga sangat dipantau yaitu 1 bulan sekali.

Mengenai penilaian waktu yang diberikan dalam pengerjaan pembangunan proyek fisik di Kabupaten Kepulauan Meranti yang diberikan waktu 5 bulan dan apabila lewat dari waktu yang telah ditentukan akan diberikan sanksi. Dan mengenai waktu dalam melakukan pengawasan berdasarkan wawancara diatas tindakan pengawasan dilakukan setiap hari tetapi tidak berturut-turut, kesimpulannya hanya seminggu beberapa kali saja.

b) Laporan Rutin

Kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah laporan yang terkait dengan proses pembangunan fisik apakah sudah mencapai target yang ditentukan atau ada hambatan dalam pengerjaan proyek pembangunan fisik.

Petugas pengawas jika melakukan pengawasan harus mengadakan laporan rutin agar pengerjaan proyek pembangunan tidak jauh dari standar pelaksanaan proyek pembangunan fisik.

c) Menilai Kualitas

Proses penilaian berikutnya yaitu penilaian kualitas pengerjaan proyek, apakah sudah sesuai dengan besaran dan teknisnya atau hanya mengedepankan proses singkat tetapi kualitas yang jauh dari yang telah ditetapkan.

Mengenai kualitas pengerjaan proyek pembangunan fisik, Dinas Pekerjaan Umum beserta pengawas terkait, turun langsung untuk melihat perkembangan pengerjaan proyek sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang baik.

c. Melakukan Tindakan Perbaikan

Yaitu tindakan yang diambil untuk menyelesaikan pekerjaan yang apabila terjadi penyimpangan agar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan apabila memang terjadi kesalahan atau penyimpangan akan segera dilakukan tindakan perbaikan. Tahap dalam melakukan tindakan perbaikan ini terbagi dalam dua sub indikator yakni :

a) Memberikan sanksi/teguran

Tindakan yang dilakukan apabila petugas pengawas melakukan kesalahan dalam melaksanakan kegiatan dalam memantau kondisi pengerjaan proyek di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu pemberian teguran ataupun sanksi, hal ini dimaksud agar pengawas tidak akan melakukan kesalahan yang kedua kalinya.

Mengenai pemberian sanksi apabila melakukan tindakan kesalahan, memang dijalankan yaitu diberikan sanksi administrasi dan apabila kesalahan yang dilakukan sudah fatal dan berulang kali akan diberikan sanksi penundaan pangkat sesuai dengan PP No. 80 tentang Pegawai Negeri.

b) Menambah jumlah pengawas

Penambahan jumlah pengawas dilakukan apabila jumlah pengawas tidak sesuai dengan jumlah pengerjaan proyek pembangunan fisik yang harus dipantau maupun diawasi.

Mengenai penambahan jumlah pengawas dilaksanakan apabila petugas-petugas pengawas sering melakukan kesalahan dan penambahan jumlah pengawas pun juga dilihat besar APBD yang ada.

Mengenai proses pelaksanaan pengawasan pembangunan fisik di Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan wawancara dengan sejumlah narasumber, menyimpulkan pelaksanaan pengawasan sudah berjalan cukup baik, akan tetapi jika penulis perhatikan dilapangan, masih banyak proyek pembangunan fisik yang belum sempurna dan jauh dari harapan dan perlu dibenahi.

2. Faktor – Faktor Penghambat Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Fisik

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pengawasan terhadap pembangunan fisik di Kabupaten Kepulauan Meranti, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat pengawasan pembangunan tersebut, diantaranya sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor pertama yang mempengaruhi penghambat pengawasan pembangunan fisik di Kabupaten Kepulauan Meranti, artinya dilihat dari segi tingkat pengetahuan, kemampuan, dan keahliannya yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan, karena pengetahuan dan kemampuan adalah modal pertama dalam melaksanakan pengawasan pembangunan fisik di Kabupaten Kepulauan Meranti ini. Dari indikator Sumber Daya Manusia terbagi lagi beberapa sub indikatornya yaitu jumlah petugas pengawasan dan kualitas petugas pengawasan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan struktur organisasi, jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 42 orang Pegawai Negeri Sipil dan 56 orang Pegawai Honorer. Secara kelembagaan, eksistensi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami penguatan karena secara eksplisit mengembang amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada.

Tabel 1 Tingkat Pendidikan Formal Pegawai Dinas Pekerjaan Umum

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	S3	-	-
2	S2	5	11,6
3	S1	22	51,2
4	D3	5	11,6
5	SD s.d SLTA	11	25,6
Jumlah		43	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Meranti Tahun 2011

Tabel 2 Pendidikan dan Latihan Penjurangan (Struktural), Teknis dan Substantif Fungsional Pegawai Dinas Pekerjaan Umum

No	Jenis Pendidikan dan Latihan	Jumlah (Orang)
1	SPAMEN, Diklat II	1
2	SPADYA/ADUM/Diklat Pim III	3
3	SEPADA/ADUM/Diklat Pim IV	2
4	Kursus Manajemen Proyek	4
5	Pelatihan Analisa Jabatan	1
6	Kursus Bendaharaan	1
7	Perpajakan	1
Jumlah		13

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Meranti Tahun 2011

Tabel 3 Jabatan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum

No	Jenis Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Kepala Bidang	5
3	Kepala Sub Bidang	2
4	Kepala Seksi	5
5	Pelaksana	7
6	Pelaksana CPNS	22
7	Pelaksana TTK	56
8	Magang	3
Jumlah		101

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Meranti Tahun 2011

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan bidang Teknik sebanyak 22 orang (9,68 %), dan bidang lainnya sebanyak 20 orang (8,80 %), ini menunjukkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti belum dapat secara optimal. Idealnya 2/3 dari jumlah pegawai yang ada harus berkualifikasi pendidikan Teknik atau 30 orang (13,20 %).

Beberapa telah mengikuti Diklat Struktural Pimpinan dengan kualifikasi Sarjana sebanyak 35 orang (14,08 %) dan pendidikan SLTA sebanyak 12 orang

(5,28 %). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia pada organisasi, dan dari segi kuantitas masih belum mencukupi untuk mengemban tugas terkait pengawasan pembangunan fisik yang semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Kualitas pegawai yang ada masih kurang, dengan kata lain Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti harus dapat meningkatkan kualitas para pegawai yang ada, agar dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan lancar, karena kualitas para pegawai dapat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pengawasan pembangunan fisik di Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Dana /biaya

Faktor dana dalam melaksanakan pengawasan sangat berperan dalam kelancaran proses pengawasan agar pencapaian tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai dengan maksimal dan sesuai yang diinginkan. Anggaran yang digunakan untuk kelancaran kegiatan pengawasan pembangunan fisik adalah anggaran operasional. Anggaran operasional yaitu biaya dalam merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam pemerintahan, anggaran operasional ini adalah untuk biaya administrasi umum dan biaya pemeliharaan.

Tabel 4 Anggaran Operasional Pegawai Bidang Bina Marga Tahun 2011 per tiga kecamatan

Belanja Pegawai	Harga Satuan	Jumlah 6 = (3x5)
PPTK 1 ORANG x 10 bulan	500.000,00	5.000.000,00
Pengawas Lapangan 2 orang x 10 bulan	300.000,00	6.000.000,00
Staff Teknis/administrasi 1 orang x 10 bulan	300.000,00	3.000.000,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan		14.000.000,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Meranti Tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas, biaya operasional tiap pegawai yang melakukan pengawasan sebesar Rp. 300.000,00 yang mana honor tersebut diberikan tiap 5 bulan sekali. Dan setiap satu orang pegawai mengawasi satu proyek yang telah ditentukan sebelumnya. Dari biaya operasional tersebut dapat dikategorikan belum mencukupi dengan kondisi yang ada, karena para pegawai yang melakukan pengawasan ke lapangan masih menggunakan kendaraan pribadi, sedangkan tugas yang dilaksanakan adalah tugas untuk kepentingan umum tetapi tidak diberikannya fasilitas dari kantor Dinas. Oleh karena itu pegawai yang melakukan pengawasan meminta untuk diberikan kenaikan honor dalam melakukan pengawasan.

Berikut tabel anggaran khusus yang dibutuhkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Bagian Bina Marga yang melakukan pengawasan pembangunan fisik.

Tabel 5 Anggaran Operasional yang dibutuhkan dalam melakukan Pengawasan

Belanja Pegawai	Harga Satuan	Jumlah 6 = (3x5)
PPTK 1 ORANG x 10 bulan	800.000,00	8.000.000,00
Pengawas Lapangan 2 orang x 10 bulan	700.000,00	14.000.000,00
Staff Teknis/administrasi 1 orang x 10 bulan	700.000,00	7.000.000,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan		29.000.000,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Meranti Tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas mengenai honor yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan pembangunan fisik Kabupaten Kepulauan Meranti besarnya dua kali lipat dibandingkan dengan honor yang diberikan saat ini.

c. Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan, baik alat-alat utama dalam melakukan kegiatan maupun peralatan pembantu yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti juga sangat memerlukan fasilitas yang lengkap guna menjalankan tugas-tugas pemerintahan agar tercapai dengan yang telah direncanakan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dapat melaksanakan pengawasan dengan baik dan lancar.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- 1) Didalam proses pengawasan yakni menetapkan standar, melakukan tindakan penilaian, dan melakukan tindakan perbaikan, berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis dapat dinilai masih kurang baik, yang menjadi permasalahan menurut penulis sekarang ini adanya masalah dalam melakukan tindakan pengawasan ataupun pemantauan pembangunan fisik di Kabupaten Kepulauan Meranti yang hanya dilakukan satu bulan sekali. Sehingga berdampak terhadap pengerjaan proyek fisik dan kualitasnya.

- 2) Didalam faktor-faktor penghambat pengawasan pemerintah daerah dalam pembangunan fisik di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang menjadi kendala dari segi Sumber Daya Manusianya yang pertama yaitu jumlah petugas pengawas yang minim, dan dari segi kualitas para pengawas yang dikategorikan masih minim dan dari segi honorinya, masih kurangnya honor pengawas serta tidak adanya kelengkapan fasilitas atau kendaraan Dinas dalam melakukan pengawasan pembangunan fisik di Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan pembangunan fisik di Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Dinas Pekerjaan Umum, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti harus selalu tepat dan tegas dalam menjalankan tugas mengawasi pembangunan fisik, serta lebih meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan fisik di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Meskipun telah dilaksanakan pelatihan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, namun akhirnya sejumlah pembangunan fisik masih tetap terbengkalai, Sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti lebih memperhatikan masalah pelatihan ini, apakah diadakan secara rutin sehingga nantinya berdampak terhadap hasil pengerjaan proyek, pelatihan yang diadakan dalam menunjang pengetahuan pegawai terkait disiplin ilmunya, dan bertujuan meningkatkan SDM untuk seluruh pegawai, dan lebih memperhatikan fasilitas sarana dan prasarananya agar dalam melaksanakan tugasnya berjalan dengan baik.
3. Diperlukan koordinasi yang baik terkait pengawasan pengerjaan proyek, sehingga apapun permasalahan yang terjadi akan dapat diatasi dengan baik, dan kesalahan diminimalisir sekecil mungkin, sehingga pembangunan fisik Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Sujamto (1996) *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*.
- Sujamto. 2003. *Beberapa Pengertian dibidang Pengawasan*. Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Sujamto. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : PT Pustaka Kuantum
- Hadari Nawawi. 1989. *Pengawasan Melekat dilingkungan Pemerintahan*. Jakarta : Erlangga.

Irawan. 2000. *Pengawasan Perda dan Kepala Daerah*. Jakarta : Bina Aksara.

Katili, Laura R. 2002. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Handayaniningrat. 2000. *Pengawasan Atasan Langsung dilingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : Erlangga.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.